

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS  
PELANGGARAN LARANGAN MUNISI TANDAN  
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
(STUDI PERANG AMERIKA SERIKAT – IRAK 2003)**

**OLEH:**

**FARHAN ADZANI**  
**1910112053**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**

***Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum***



**Pembimbing :**  
**Dr. Syofiran Syofyan, S.H., M.H**  
**Sri Oktavia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 03/PK-VI/I/2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN LARANGAN  
MUNISI TANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
(STUDI PERANG AMERIKA SERIKAT – IRAK 2003)**

**(Farhan Adzani, 1910112053, Fakultas Hukum Universitas Andalas,**

**128 Halaman 2023)**

**ABSTRAK**

Perang merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai suatu tujuan, baik untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hak, dan untuk memperbaiki kesalahan serta untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Walaupun perang diakui sebagai sarana untuk mencapai tujuan, perang tetap diatur di dalam ketentuan hukum perang, baik tentang bagaimana cara berperang ataupun senjata yang digunakan dalam berperang. Dalam hukum perang, penggunaan senjata berbahaya dilarang untuk digunakan, salah satunya adalah munisi tandan. Namun masih terdapat negara yang masih menggunakan munisi tandan dalam peperangan, seperti perang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Irak tahun 2003. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan munisi tandan menurut hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban AS sebagai negara yang melanggar larangan munisi tandan pada perang AS – Irak 2003. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan instrumen hukum Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, Konvensi Senjata Tertentu dan Konvensi Munisi Tandan serta ILC Draft 2001. Penelitian ini menemukan bahwa AS melakukan pelanggaran larangan munisi tandan yang digunakan dalam perang dengan Irak yang menimbulkan banyak korban warga sipil dan AS tidak memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang salah sesuai dengan aturan dan kebiasaan hukum internasional. Hal ini dikarenakan AS mendasarkan tindakan tersebut atas alasan pertahanan negara atas tindakan terorisme, keadaan yang membahayakan dan tindakan yang dibutuhkan. Pelanggaran ini telah memasuki ICC namun penyelidikannya ditutup karena tidak ada bukti yang kuat untuk melanjutkan kasus tersebut ke penuntutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran, Larangan, Munisi Tandan, Perang, AS, Irak, Hukum Humaniter Internasional.

**STATE RESPONSIBILITY FOR VIOLATING THE BAN ON CLUSTER  
MUNITIONS UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
(STUDY OF THE 2003 UNITED STATES - IRAQ WAR)**

(Farhan Adzani, 1910112053, Faculty of Law, Universitas Andalas, 128 Pages  
2023)

**ABSTRACT**

War is one of the means used by a state to achieve a goal, either to resolve disputes, enforce rights, and to correct mistakes as well as to achieve its national interests. Although war is recognized as a means to an end, it is still regulated under the provisions of the laws of war, both on how to fight and the weapons used in war. In the laws of war, the use of dangerous weapons is prohibited, one of which is cluster munitions. However, there are still countries that still use cluster munitions in warfare, such as the war that occurred between the United States and Iraq in 2003. Therefore, this research aims to find out how the regulation of the prohibition of cluster munitions according to international humanitarian law and to find out how the responsibility of the US as a country that violated the prohibition of cluster munitions in the 2003 US - Iraq war. The type of research used is normative juridical research conducted by examining library materials or secondary data. This research uses the legal instruments of the Geneva Convention, Hague Convention, Specified Weapons Convention and Bunch Munitions Convention as well as the ILC Draft 2001. This study found that the US violated the ban on cluster munitions used in the war with Iraq which caused many civilian casualties and the US did not provide accountability for wrongful acts in accordance with the rules and customs of international law. This is because the US based its actions on the grounds of national defense against acts of terrorism, dangerous circumstances and necessary measures. These violations have entered the ICC but the investigation was closed due to lack of evidence to proceed to prosecution.

Keywords: Responsibility, Violation, Ban, Cluster Munitions, US, Iraq, International Humanitarian Law.

d